

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan atau aset suatu bangsa. Semakin banyak penduduk bagi suatu negara dapat mempengaruhi perkembangan bangsa, maka dari itu banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Bagi negara Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini merupakan suatu beban atau suatu refusi. Karena bagi negara Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh pada pembangunan. Kualitas sumber daya manusia penduduk indonesia yang rendah juga merupakan penghambat pembangunan. Banyaknya masalah kependudukan itu membuat pemerintah melakukan banyak upaya untuk mengatasinya. Pemerintah terus melakukan pembangunan baik itu dalam aspek fisik dalam hal infrastruktur serta melakukan pembangunan sumber daya manusia agar menjadi lebih berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator dan eksekutor kebijakan bertanggungjawab penuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi keinginan rakyat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan, dan berkeadilan sosial, menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintah secara efisien dan efektif.

Dalam upaya ini diusahakan ditingkatkan keterpaduan dan koordinasi upaya pengendalian kelahiran dengan berbagai kegiatan pembangunan

lainnya, khususnya upaya pembangunan di bidang kesehatan, transmigrasi, pengendalian urbanisasi, pendidikan, pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Usaha penurunan tingkat pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui tolak ukur angka pertumbuhan dalam menggunakan alat kontrasepsi antara suami-istri, Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki anak lebih dari dua. Peningkatan kesertaan ber-KB merupakan bagian penting program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga). Upaya peningkatan penggunaan kontrasepsi modern bagi Pasangan Usia Subur menjadi bidikan utama program terkait dengan efektivitasnya. Berbagai metode kontrasepsi modern disediakan sebagai pilihan seperti IUD, implan, suntik, pil, kondom dan Medis Operasi Pria (MOP) serta Medis Operasi Wanita (MOW) agar dapat memilih sesuai kebutuhannya. Namun tetap diberikan motivasi untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Untuk mempertahankan kesertaan ber-KB sehingga tidak terjadi drop out dilakukan dengan pembinaan rutin melalui kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat. Kegiatan keluarga sejahtera dikembangkan melalui Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang terdiri dari kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) serta peningkatan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik PUS yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan

tahapan kesejahteraan dan memantapkan. Tujuan umum dibentuknya UPPKS adalah mengembangkan potensi peserta KB dan calon peserta KB untuk memantapkan diri dan keluarganya agar mampu hidup mandiri dalam rangka mempercepat proses pelebagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Adapun secara khusus tujuannya antara lain: meningkatkan kesertaan KB di masyarakat, meningkatkan pendapatan keluarga, mengembangkan ketahanan keluarga, dan memantapkan pelaksanaan 8 fungsi keluarga. BKKBN juga melakukan penggarapan generasi muda agar terhindar dari tiga hal, yakni seks bebas, nikah dini dan penyalahgunaan Napza.

Kemudian pada tahun 1970 resmilah program KB menjadi program pemerintah dengan ditandai pencanangan hari keluarga nasional pada tanggal 29 Juni 1970. Pada tanggal tersebut pemerintah mulai memperkuat dan memperluas program KB ke seluruh Indonesia. Pada tahun tersebut BKKBN resmi sebagai lembaga yang mengelola program KB. Program KB mempunyai sebuah motto yaitu “dua anak cukup” motto itu dipakai karena penduduk Indonesia yang telah menikah pada masa sebelum dirintis KB memiliki anak dengan jumlah banyak. Hal ini dikarenakan sebuah kepercayaan bahwa banyak anak banyak rezeki sehingga setiap pasangan bisa melahirkan sampai 11 orang. Program KB telah berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di Indonesia sekarang karena sudah banyak penduduk Indonesia yang mengikuti program KB walaupun belum semua penduduk Indonesia mengikuti program tersebut. Namun, penduduk Indonesia yang mengikuti program tersebut telah

membantu pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN juga mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. BKKBN sendiri mencanangkan berbagai macam program yang berkaitan dengan kependudukan dan kualitas penduduk termasuk generasi muda. Untuk memperkenalkan KB kepada remaja, maka BKKBN tengah gencar-gencarnya mengkampanyekan salah satu program mereka, yang disebut dengan Generasi Berencana (GenRe). Program KB untuk remaja ini atau program GenRe didukung dengan didirikannya PIK KRR (Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja). Organisasi ini sangat membantu pemerintah untuk mensukseskan program KB untuk remaja sehingga tujuan pemerintah untuk menjadikan “Anak Indonesia Harapan Masa Depan” dapat tercapai.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki program Kampung Keluarga Berencana yang bertujuan untuk penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Dimana kegiatan tersebut mengacu dan pedoman pada beberapa Peraturan dan Perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Poin E Menimbang bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 1 Ayat 8 Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat 3 Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 18 sebagaimana dimaksud Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Rukun Warga, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Langkah BKKBN mencanangkan program kampung KB yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional

aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Amanat Presiden RI Jokowi kepada BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, kegiatan tersebut dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera membentuk Kampung Keluarga Berencana (KB). Kampung KB adalah satu wilayah setingkat RW, Dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Prinsipnya program KKBPK, mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat

dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat. Selain itu, manfaat kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, kampung KB tidak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan. Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterahkan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor.

Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya. Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan ktp, penyediaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD, P2WKSS. Meski demikian, tidak semua kampung bisa masuk program kampung KB. Ada kriteria yaitu utama wilayah dan khusus. Dalam hal kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana kampung/RW tersebut berada. Bagi yang membentuk setara Desa, jumlah keluarga miskin di Desa tersebut harus diatas rata-rata Kecamatan dimana Desa itu berada. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah. Dalam hal kriteria wilayah, setiap kampung KB harus memenuhi unsur seperti berada di wilayah kumuh, kampung pesisir atau nelayan, berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), di daerah bantaran Kereta Api, Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotaan), Terpencil, Wilayah Perbatasan, Kawasan Industri, Kawasan Wisata, Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi. Sedangkan dalam hal khusus, dibutuhkan intervensi lintas sektor. Kampung KB wajib memiliki unsur antara lain pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai. Untuk memenuhi kriteria tersebut, intervensi dari sektor lain sangat diperlukan seperti Direktorat Advokasi dan KIE, BKKBN dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.

Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan Kampung Keluarga Berencana di 154 Kelurahan. Program Kampung KB ini dilakukan oleh Walikota Surabaya Tri Risma Harini yang menunjuk Kampung RW 12 ini menjadi Kampung KB di Kelurahan Sidotopo dengan pemberian Surat Keputusan Camat pada tanggal 2 Desember 2019. Deklarasi kampung KB ini diresmikan di Balai RW XII Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Pencanangan kampung KB tersebut adalah langkah untuk menjalankan kembali program pemerintah mengenai Keluarga Berencana yang sudah mulai sedikit peminatnya. Pencanangan kampung KB ini merupakan langkah untuk menyuluhkan kepada masyarakat agar dalam menerima pelayanan KB bisa lebih efisien dan lebih cepat. Jika pencapaian program kampung KB di wilayah Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya cukup baik, maka wilayah tersebut bisa dikatakan layak sebagai percontohan Kampung KB karena wilayah tersebut padat penduduk, seperti berita dari surabaya.go.id yang peneliti kutip:

“... Guna mendukung program KB, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemmas KB) mencanangkan kampung KB. Bertempat di Balai RW XII Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, kampung KB ini diresmikan secara langsung oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Kamis (4/8/16). “Terpilihnya kampung ini karena mengingat kondisi kampung yang padat penduduk dan KB nya kurang dari 50 persen, angka putus sekolah besar, balita jarang ke posyandu. Sehingga tokoh masyarakat, ketua RW beserta yang lain bersemangat untuk memajukan kampungnya agar menjadi kampung baik dengan keluarga berkualitas”, ujar Nanis Chairani. Sementara itu, Walikota Risma dalam kesempatan tersebut mengimbau kepada seluruh kader, baik itu ibu-ibu, ketua RT maupun RW serta masyarakat agar mengaktifkan kembali gerakan datang ke posyandu. “Kita tidak bisa sekedar melahirkan anak, tumbuh kembang seseorang dimulai bayi hingga balita karena hal itu akan berpengaruh pada pertumbuhan fisik, mental dan kecerdasan intelektual”, ungkapnya.

Walikota Risma juga mengatakan bahwa program ini bukan hanya sekedar dilihat dua anak cukup tetapi juga tentang pendidikan, kesejahteraan keluarga dan bagaimana perencanaan ke depan.

(<https://surabaya.go.id>)

Berdasarkan uraian diatas, Kecamatan Semampir merupakan salah satu kecamatan dengan penduduk terpadat di Kota Surabaya, dimana banyak masyarakat miskin yang tersebar di 5 Kelurahan dengan laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, SDM rendah, dan ekonomi yang masih lemah. Wilayah Kecamatan Semampir merupakan wilayah yang cukup luas dan padat serta masyarakatnya cukup heterogen dan terdiri dari berbagai suku yang tinggal di wilayah Kecamatan Semampir, diantara Kelurahan Sidotopo yang dalam hal ini terdiri dari 12 RW dan 96 RT, bagaimana sulit dan beratnya kita harus menghadapi permasalahan yang cukup kompleks di wilayah yang cukup padat dan berbagai problema, maka dengan itu semua permasalahan bisa teratasi dengan pendekatan yang persuasif dan kekeluargaan. Kelurahan Sidotopo merupakan bagian dari Kecamatan Semampir juga memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Kelurahan yang ada di Kecamatan Semampir yaitu, Pegirian, Ujung, Wonokusumo dan Ampel.

Tujuan kampung KB ini sebagai pengurus kampung harus komitmen untuk selalu berpacu dalam menyukseskan program kampung KB, supaya apa yang masyarakat inginkan bisa tercapai dalam mewujudkan kampung KB yang sukses dan tidak hanya masalah terhadap KB nya tapi beberapa sektor yang diandalkannya. Program Kampung Keluarga Berencana yang dilaksanakan Kelurahan Sidotopo mempunyai sasaran yang ditujukan untuk

menekan reproduksi menjadikan masalah pendidikan yang cukup sulit bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan terlalu banyak anak, maka efeknya anak tersebut tidak bisa meneruskan ke jenjang yang cukup tinggi, dengan demikian sasaran yang kita harapkan untuk masa depan anak-anak akan bisa tercapai dengan menekan angka penambahan anggota keluarga, tapi tidak diimbangi dengan ekonomi yang cukup.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut George C. Edward III dalam Anggara (2014) dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* menjelaskan bahwa implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (output, outcome).

Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan yang dipengaruhi oleh objek yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Dalam hal ini apa yang diinginkan oleh seluruh masyarakat wilayah Kelurahan Sidotopo pada umumnya adalah hasil dalam penyuluhan kepada masyarakat di kampung KB bisa dirasakan terutama masalah perbaikan ekonomi, pendidikan, lingkungan dan sosial serta masalah perencanaan keluarga yang sejahtera, tapi semua itu harus melibatkan seluruh elemen yang ada terutama pengurus kampung dari RT, RW, Kader, dan tidak lupa melibatkan Karang Taruna, dengan melibatkan semua itu untuk memudahkan program kampung KB dalam menjalankan penyuluhan maupun sosialisasi.

Petugas Keluarga Berencana yang disingkat PKB Kecamatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program KKBPK. Petugas disini tugasnya yaitu koordinator lapangan yang terjun kemasyarakat dengan bersosialisasi dan penyuluhan bersama-sama kader serta pokja-pokja yang sudah terlatih untuk mendekati masyarakat yang belum paham dengan Program KB, juga bekerja sama dengan Puskesmas Sidotopo yang selalu mensupport kegiatan penyuluhan serta didukung kader-kader dari Kecamatan Semampir, terutama dari PKB yang selalu mendampingi dimana seluruh kader-kader mendapatkan pelatihan-pelatihan.

Memang tidak mudah untuk menyakinkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, maka dengan bekerja sama dengan pihak yang terkait. Tidak hanya pelatihan dan penyuluhan saja

yang diperlukan, tetapi dalam penataan lingkungan juga harus ditunjang oleh dinas pertanian yang memberikan bibit tanaman yang berguna untuk menambah penghijauan di wilayah yang kumuh, selain itu juga dari dinas pertamanan dan kebersihan yang selalu membantu dalam pembuatan taman dan membantu memberikan tanaman hias dan kompos sepanjang kampung KB tersebut serta memberikan penyuluhan masalah pembuatan taman dan cara perawatannya. Selain itu dalam menyebarkan berita selalu memakai bener dan pamflet yang kita tempel di papan-papan pengumuman di setiap pos kamling yang ada di RT dan RW dalam pemasangan banner di setiap sudut gang-gang, maka dengan itu masyarakat akan lebih mengerti dan memahami apa yang kita sampaikan mengenai isi dari banner itu yang berkaitan dengan KB dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Dalam istilah pokja sendiri merupakan rencana kerja tahunan yaitu program jangka panjang yang harus di laksanakan dan dilaporkan setiap akhir tahun dimana semua pokja harus melakukan progres di setiap sektor dimana seluruh kegiatan itu nanti bisa memicu seluruh rangkaian apa yang selama satu tahun itu dilakukan. Dengan dilihat dari beberapa faktor laporan tahunan juga dilihat dari berhasil atau tidaknya suatu program yang dikelola oleh pokja, oleh karena itu jika gagal program ini terus di galakan untuk menutupi kekurangan yang tertinggal, karena dengan melihat progres tahunan pokja itu bisa mengkoreksi dan melakukan pembenahan dan kekurangan. Oleh karena itu, rencana kerja tahunan adalah suatu evaluasi yang cukup baik dalam

mengelola suatu organisasi dimana program ini harus terprogram dengan skedul yang sudah terjadwal.

Selain program kerja tahunan ada juga program kerja bulanan yang menjadikan tolak ukur kegiatan yang dalam hal ini cukup cepat dan harus tanggap, karena rencana kerja bulanan ini harus selalu di pantau mengingat progresnya terlalu sempit dan cepat bila ada permasalahan yang susah untuk diperbaiki, maka dengan rencana kerja bulanan akan semakin cepat untuk melakukan suatu tindakan untuk perbaikan dan sangat berpengaruh dalam kegiatan yang dibuat cukup padat. Sehingga kegiatan itu cepat sekali ke bulan berikutnya hendaknya pengurus selalu mencatat apa yang sudah di program dan di rencanakan dalam bulan berikutnya. Dengan harapan program jangka pendek ini yang berkaitan dengan penyuluhan dan sosialisasi di masyarakat mengenai Kampung KB bisa tercapai apa yang diinginkan oleh pemerintah, dalam hal ini semua sektor bisa berjalan sesuai dengan arahan dari ketua pokja masing-masing yang ada di lapangan supaya lebih insentif dalam menjalankan program yang sudah ter progres setiap bulannya.

Dalam kegiatan pengelolaan Kampung KB adapun permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat Kelurahan Sidotopo pada umumnya dan harus kita hadapi bersama dengan kader-kader tingkat RW, Kelurahan maupun Kecamatan mereka juga selalu memberi arahan atau masukan guna kesejahteraan masyarakat tingkat bawah, juga peran serta stakeholder, dan para pemuda yang bergabung di Karang Taruna yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam membantu kegiatan Kampung KB, PIK Remaja,

Remaja Patrol yang selalu membuat suatu program dan kegiatan yang cukup positif. Semua kegiatan memang tidak lepas dari pendanaan dan biaya yang tidak sedikit, selain tenaga, pikiran dan waktu secara otomatis harus tersita tapi dengan kebersamaan dan saling membantu akan terlaksana yang didasari dengan ikhlas dan rasa sosial yang tinggi dalam menuju kampung sejahtera yang bisa tercapai dengan saling membantu dan memberikan masukan atau motivasi sehingga masalah kegiatan yang ada bisa terlaksana dan bisa tercapai.

Seluruh kegiatan dalam mengoptimalkan pastinya membutuhkan dukungan biaya atau pendanaan guna menunjang kegiatan Kampung KB serta kelancarannya, maka dari itu peran PKB selalu mencari dana secara gotong royong dan mengandalkan dana kas RT dan RW setiap bulan dengan para RT menarik iuran tidak lebih dari Rp.7000 yang berguna untuk biaya tukang sampah, masuk kas RT, dan biaya perbaikan lampu. Masyarakat disini pun cukup aktif bila ada kegiatan massal terutama perbaikan lingkungan dan kerja bakti, serta para kader juga cukup antusias untuk membuat kegiatan dalam hal pikiran dan masalah, apalagi mereka para kader mempunyai tugas dan peran masing-masing. Memang tidak mudah dalam mengelola suatu kampung dalam kategori miskin dan kumuh untuk mengikuti program yang dilakukan oleh pemerintah kota kepada Kampung KB ini, dengan biaya dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengelola sebuah Kampung KB, karena memang ada bantuan dari dinas terkait untuk perbaikan infrastruktur dan perbaikan lingkungan serta bantuan bibit tanaman. Dalam mengandalkan anggaran setiap

RT dan pihak masyarakat yang membantu dalam kegiatan kerja bakti yang di agendakan setiap tiga bulan sekali, demi untuk memperbaiki lingkungan yang kumuh sesuai dengan apa yang sudah di programkan oleh pokja.

Sasaran program Kampung KB di Kelurahan Sidotopo adalah masyarakat Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dimana program ini sudah dijalankan sejak bulan Agustus tahun 2016. Dengan adanya program Keluarga Berencana tersebut, penulis ingin menindaklanjuti dan mengkaji lebih dalam tentang program tersebut. Maka berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas penulis berpendapat perlu adanya kajian tentang Implementasi terhadap Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Adapun judul yang diambil peneliti ini adalah Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis

tentang Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti dapat mengetahui tentang Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan bagi mahasiswa referensi serta menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang materi perkuliahan khususnya Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa yang akan datang, serta untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan menambah referensi khususnya di Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

3. Bagi Kelurahan Sidotopo

Diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat untuk menggunakan KB, serta meningkatkan Program Kampung KB di RW 12 agar dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan oleh pemerintah.